

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Gunawan Hi. "Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 4 (2025): 496–508.
- Adahayanto, Oksep. "Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal FISIP UMRAH* 2, no. 2 (Januari 2017): 160.
- Adnan, M. Adib. "Konsep Siyāsah Shar’iyyah dalam Perspektif Masalahah Ibn Qayyim al-Jauziyyah." *Al-‘Adalah: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2016): 1–15.
- Ahmad, Hamzah, dan Ananda Sentosa. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya, 1996.
- Al Faridzi, Mohammad, and Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3014–3019.
- Alfaini, Miatu. *Analisis fiqh siyasah terhadap pertimbangan DPR RI dalam pemberian amnesti*. Diss. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Alidar, E. M. K. *Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia: Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun*. PhD diss., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Asiah, Hj. Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (Juli 2020): 118–128.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

- Azizah, Jihadini Nur, and Siti Ngainnur Rohmah. "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi kepada Terpidana Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 10, no. 2 (2022): 167–188.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 24-25
- Baits, Ammi Nur. "Fathu Makkah: Pelajaran dari Penaklukan Kota Makkah." *Muslim.or.id*, 2009. <https://muslim.or.id/1318-fathu-makkah-pelajaran-dari-penaklukan-kota-mekkah.html>. [diakses oleh editor di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 24 Maret 2018].
- Dewi, Sintha, dan Dyah Adriantini. "Pendayagunaan *Freies Ermessen* Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan." *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 1–20.
- Djazuli, Achmad. *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, dan Rahma Nufiza Amalia Putri. "Rekonstruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): 1–14.
- Fauzi, Suyogi Imam. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 621–636.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.

- Hasmalina, Pegi. *Tinjauan Fikih Siyasah tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi)*. PhD thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Hasti, Saila Riskina. “Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam).” Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Helman, Erlangga Dwi Prayata. *Pergeseran Paradigma Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri*. PhD thesis, Universitas Andalas, 2024.
- Huda, Ni'matul. “Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum* 6, no. 18 (2001): 1–20.
- Indra, Muhammad Ridwan, dan Satya Arinanto. *Kekuasaan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sangat Besar*. Jakarta: CV Trisula, 1998.
- Iskandar, Mizaj. *Progresifitas Pemberian Amnesti di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun)*. 2023.
- Jhon Locke, “two treatises of government, from the works of jhon locke. A new edition”, (On-Line), Tersedia di: <http://www.efm.bris.ac.uk/het/locke/government.pdf>. (10 Desember 2016).
- Johansyah. “Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16, no. 2 (2018): 190–205.
- Karyati, Sri, and Hafizatul Ulum. “Redesain Wewenang dan Tanggung Jawab Presiden dalam Sistem Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan.” *Jatiswara* 39, no. 2 (2024): 274–282.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khushardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV Sinar Bakti, 1980.

- Latifah, Zahrotul. *Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Grasi kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika Perspektif Fikih Siyasah*. Skripsi, UIN Saizu, 2023.
- Lestari, Wilda. "Tindak Pidana Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis dan Hukuman ." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 23–32.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum (Menegakkan Konstitusi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mahfud MD. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2003.
- Maimun. *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya (Pada Kasus-Kasus Hukum Islam)*. Lampung: Aura, 2015.
- Manan, Bagir. "Kekuasaan Prerogatif." Makalah yang dipublikasikan. Bandung, 20 Agustus 2012.
- Manan, Bagir. *Undang-undang Dasar 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif (Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang-undang Dasar 1945)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2003.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV Amanah, 2020.
- Maulana, Rikiandi Sopian, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi, dan Rachman Maulana Kafrawi. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (Juni 2024): 54–59.
- Meliana, Lili. *Kekuasaan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen (Tinjauan Yuridis Pasal 4 dan 5)*. PhD thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2012.

- Merpaung, Lintji Anna. *Hukum Tatanegara Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Minta, Suhardi T. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Penjara Sebagai Pengganti Hukuman Kisas*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Muhammad, Ahsin Sakho, ed. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Muhammad, Riyanto Firmansyah. "Analisis Hukum Tentang Pemberian Grasi Terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka Ditinjau dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Crimen* 8, no. 2 (2019): 1–12.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–25.
- Rafiq, Ahmad. *Perubahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Rahman H. I., A. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ramadani, Rizky Malinto, Indra Perwira, and Bilal Dewansyah. "Problem Pemberian Amnesti oleh Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 984–992.
- Razali, Mutiara Fahmi, Azmil Umur, and Sinta Kartika Putri. "Amnesti: Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022): 266–288.
- Salisa, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 149–152.
- Sari, Milya, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.

- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Simorangkir, J. C. T., Rudy T. Erwin, dan J. T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Tama, Ilham Mahendra. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* (2023): 24-32.
- T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Median, 1994.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1.
- Zainuddin, H. *Kontroversi Seputar Hukuman Mati Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.